

# Forum Profesor Bandung, "Catatan Kritis Akhir Tahun 2025 & Proyeksi 2026 Kinerja Wali Kota Bandung"

Category: News

15 Desember 2025



## Forum Profesor Bandung Digelar oleh IPRC

**BANDUNG, Prolite** – Indonesia Politics Research Consulting (IPRC) menggelar diskusi publik Forum Profesor Bandung bertajuk 'Catatan Kritis Akhir Tahun 2025 & Proyeksi 2026 Kinerja Wali Kota Bandung.

Menurut Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan UNPAD, Prof Muradi Forum Profesor Bandung ini menjembatani kajian akademik dan praktik pemerintahan di lapangan sekaligus ajang kritis pemerintah selama ini.

“Forum Profesor Bandung ini diadakan untuk mengisi ruang-ruang yang tidak diisi oleh kampus. Di kampus ada dewan profesor, dewan guru besar. Tapi tidak terlalu ada linkage (keterkaitan, red) dengan operasional di lapangan,” jelas Muradi di Hotel Grandia, Jl Cihampelas, Senin (15/12/2025).

Muradi juga berharap dengan forum ini akan ada kolaborasi yang sifatnya teknis antara akademisi dengan pemerintah. Dan karena baru sembilan bulan M Farhan dan Erwin ini menjadi kepala daerah, diakui Muradi pihaknya menunggu untuk sama-sama evaluasi yang lebih detail.

“Tapi poin pentingnya ya ada on the track, supaya ada “nyambut bola” lah dari teman-teman di kampus, itu bisa ketemu,” jelasnya.

Masih kata Muradi yang harus dilakukan pemerintah yakni pertama memang harus ada program prioritas. Yang kedua kolaborasi antara koordinasi internal Wali kota sendiri.

“Pemkot diatur supaya kemudian bisa mengelaborasi program unggulan atau program prioritas. Yang ketiga itu ada kolaborasi tadi, karena disampaikan juga Pak Wali sudah ingin ada kolaborasi antara kampus dan sebagainya,” imbuhnya.

Karenanya Muradi kembali menegaskan, forum profesor Bandung ini mampu mengisi ruang yang memang hampir kosong. Sebab, kebanyakan orang masing-masing.

“Saya kira hari ini akan besar forum Profesor Bandung untuk bisa mengelaborasi kepentingan Kota Bandung jauh lebih besar. Jadi saya kira paling penting adalah bagaimana kemudian ini disambut baik oleh teman-teman di Pemkot, supaya ada *linkage* antara kampus dengan Pemkot yang lebih teknis, ya. Bukan hanya sebatas teori wacana, tapi ini teknis,” tuturnya.

Disinggung terkait penetapan tersangka terhadap Wakil Wali Kota Bandung Erwin, menurut Muradi kepemimpinan tidak pincang karena kepala daerah itu sepaket. Kalaupun kemudian salah satu

tersangka, kebijaksanaan dilakukan oleh kepala daerah.

“Hanya tinggal nanti mengefektifkan peran sekda dan dinas-dinas. Saya kira kalau banyak kejadian di beberapa kota dan kabupaten, termasuk provinsi, salah satunya bermasalah, kemudian bisa efektif juga berjalan. Karena bisa mengefektifkan tadi kolaborasi, koordinasi, dan programnya bisa kemudian diterima oleh publik secara terbuka, seperti itu,” tegasnya.

Sementara itu Wali Kota Bandung M Farhan mengaku pihaknya sangat menunggu forum tersebut untuk bisa mendapatkan masukan bersama.

“Karena bagaimanapun juga memang kita ini butuh satu pandangan yang lebih clear, yang lebih objektif. Selama ini kan kalau di Pemerintahan Kota Bandung itu, satu, pasti ada banyak kepentingan yang mesti kita akomodir. Kedua, ada banyak juga subjektivitas. Ketika, contohnya, saya terlibat dalam rutinitas itu lama-lama, menurut saya yang pentingnya cuma yang rutin, sedangkan yang esensial, substansial, menurut hal-hal yang pandangan lebih objektif, bisa jadi kelewatan,” jelas Farhan.

Menurutnya forum ini menjadi sebuah bagian untuk bisa menjalin komunikasi yang lebih erat bukan sekadar wacana. Bentuk-bentuk kerja sama yang lain yang bisa diujikan sama-sama.

“Secara kelembagaan, kita selalu melakukan kerja sama MOU dengan semua perguruan tinggi. Tapi pada saat bersamaan, tentu saja di setiap perguruan tinggi juga punya sosok-sosok yang bisa kita jadikan, dalam tanda petik, pegangan. Itu yang diperlukan,” ucapnya.

Soal kritikan pedas bagi Farhan tidak masalah, justru kata Farhan selama masih dikritik, artinya masih disayang.

“Kalau sudah tidak dikritik, artinya dicuekin. Wah, bahaya itu, Pak,” jelasnya.

Dalam forum itu Farhan pun sempat menyampaikan bahwa korupsi dilakukan Wakil Wali Kota dan Ketua DPD partai NasDem merupakan kegiatan individu tetapi menjadi tanggungjawab bersama.

“Kalau biasa dilakukan bersama tanggungjawab individu, ini saya akan membuktikan bahwa itu dilakukan individu menjadi tanggungjawab bersama. Kami saat ini sedang bekerja keras membangun kembali kepercayaan publik,” tuturnya di sesi tanya jawab forum tersebut.